



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Publik Hanya Tahu Haislnya

### Luput Awasi Penyusunan Anggaran

JAKARTA - Adanya keinginan Pemprov DKI mempublikasikan nilai anggaran pada APBD 2020 usai pembahasan, dinilai kurang tepat. Seharusnya publikasi itu dilakukan sebelum masuk usulan atau selambat-lambatnya saat dilakukan pembahasan.

"Ini yang tidak benar, pihak kejaksaan dan mendagri seharusnya menerjunkan tim khusus untuk mengecek kebenaran mata anggaran yang dirancang Pemprov DKI sejak dibahasnya anggaran tahun 2019 sampai pembahasan sekarang," kata Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor, Minggu (10/11/2019).

Tigor mengaku, khawatir kalau publikasi anggaran itu dilakukan usai pembahasan anggaran. Seharusnya ketika pembahasan digelar, maka publikasi dilakukan. "Sehingga, masyarakat dilibatkan dalam pengawasan mata anggaran yang diusulkan esekutif," kata dia.

Usulan dibentuknya tim khusus dari Mendagri dan Kejaksaan, sambung Tigor, juga untuk mengecek kembali kenapa di 2019 tidak ramai seperti sekarang.

Seolah, kata dia, antara legislatif dan eksekutif diduga terjadi persekongkolan. "Makanya harus dicek lagi, kenapa mulus sekali pembahasan di tahun 2019," imbuh dia.

Bahkan, kata Tigor, sampai sekarang masih banyak mata anggaran siluman yang berseleweran di pagu KUA PPAS APBD 2020. Malah nilainya sangat fantastis. "Dinas Pendidikan yang banyak terjadi mata anggaran fantastis. Sehingga, perlu diawasi ketat," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, seluruh mata anggaran tahun 2020 akan diunggah usai dilaksanakannya kesepakatan antara legislatif dan esekutif dalam rapat badan anggaran DPRD DKI Jakarta.

"Setelah ini disepakati angkanya, baru saya dengan persetujuan gubernur membuat surat edaran kepada SKPD untuk melakukan input atas komponen-komponen," kata dia, beberapa waktu lalu ■

Karena pada dasarnya, pembahasan di badan anggaran tak berbeda jauh dengan pembahasan KUA-PPAS. Sebab, nantinya akan dilakukan juga penyisiran anggaran yang disepakati sebelumnya. "Makanya saya ingatkan kepada SKPD untuk tidak memasukan nilai mata anggaran yang aneh," tambah dia.

Dia berharap kepada seluruh anggota DPRD agar bisa mempercepat pembahasan KUA PPAS. Sebab, tengat waktu batas pengesahan APBD tahun 2020 semakin sempit.

"Tanggal 30 November APBD harus disyahkan. Karena Desember 2019 itu harus dikirimkan ke Kemendagri dan dievaluasi selama 15 hari, dan dikirimkan kembali ke sini untuk direvisi sesuai evaluasi tersebut," tandas dia.

#### Temuan PDIP dan PSI Disepelekan

Partai Gerindra menyepelkan kejanggalan anggaran yang ditemukan oleh PDI Perjuangan dan PSI. Partai besutan Prabowo Subianto itu menganggap hal biasa karena angkanya tidak fantastis.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Syarif mengatakan, benar seperti apa yang diucapkan oleh korega-koleganya di Partai Gerindra. Contohnya, Ketua DPD Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik.

Dalam hal ini, kata Syarif, Taufik menyebut kejanggalan anggaran yang ditemukan oleh PSI dan PDIP tidak mengagetkan dirinya. Temuan angka-angka fantastis tersebut sebagai hal yang biasa saja

Dia juga menyatakan, temuan PSI dan PDIP soal kejanggalan di KUA PPAS bukan hal istimewa. "Saya sih melihat biasa-biasa aja, enggak ada yang istimewa," kata Syarif saat dihubungi INDOPOS, Minggu (10/11).

Menurut Syarif, koleganya dalam hal ini Taufik pernah menemukan kejanggalan sebesar Rp1,2 triliun.

Namun, perbedaan antara Gerindra dengan PDIP dan PSI adalah tidak melapor ke media soal temuannya tersebut.

Ia menyatakan, pihaknya menyelesaikan permasalahan tersebut di dalam forum, tanpa memberitahu publik. "Dulu Pak Taufik temuin Rp1,2 triliun, cuman kalau dulu kita tidak lapor ke media, kita beresin di dalam. Kita beresin yang Rp1,2 triliun," tambah Syarif.

Syarief menjelaskan, soal membahas kejanggalan di KUA PPAS. Soal pembahasan kejanggalan dapat dilakukan pada proses pembahasan.

"Karena bahan ini disisir di dalam pembahasan KUA PPAS, dalam proses pembahasan itu sangat terbuka," pungkasnya.

Syarief mengatakan, saat pembahasan berlangsung, media boleh hadir mengawasi proses. Begitupula dengan LSM dan pengamat. "Media boleh hadir, LSM boleh hadir, pemerhati boleh hadir," imbuhnya.

Ia kembali mengatakan pembahasan yang dilakukan selalu terbuka untuk publik. "Karena DPRD itu selalu pembahasannya terbuka untuk umum," jelasnya.

Syarief juga menyebut PSI kembali berulah. Kali ini dengan meminta Gubernur Anies Baswedan untuk membatalakan ajang balap mobil listrik, Formula E.

Syarief mengaku heran dengan sikap PSI itu. "Sekarang saya bisa mengatakan kalau enggak berulah bukan PSI namanya," ujar Syarif.

Syarief menyebut sikap PSI itu bertolak belakang dengan sikapnya saat rapat komisi. Menurutnya, tidak ada pernyataan PSI menolak ajang Formula E. "PSI dalam rapat komisi tidak ada komentar

apapun yang saya dengar," kata Syarif.

Diketahui, Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengaku menemukan beberapa anggaran ganjil dalam KUA PPAS DKI 2020, meskipun pihak Pemprov sudah merevisinya. Salah satu rencana anggaran yang dinilai ganjil oleh fraksi banteng moncong putih itu adalah pengadaan pasir untuk sekolah di Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat.

"Minggu lalu kan pembahasan sama Dinas Pendidikan dan Komisi E. Saya minta berkas. Karena kalau bahas detail itu kan di RAPBD, tapi saya minta berkas, saya lihat, saya sisir, tiba-tiba menemukan. Itemnya dia tulis pasir, di alat peraga sekolah dari SMP, dan SMK, SD juga. Masing-masing ada yang Rp5 miliar. Itu kita hitung-hitung sampai Rp52 miliar," ucap Wakil Ketua Fraksi PDIP Ima Mahdiah, Minggu (10/11/2019).

Ima melihat kejanggalan terhadap rencana anggaran tersebut. Terlebih, pengadaan pasir itu bukan untuk rehabilitasi sekolah. "Dia tertulis penyediaan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri. Terus denvediaan Biaya Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Bisnis Manajemen, dan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi. Karena kan manajemen dan teknologi nggak ada urusan dengan pasir. Kalau rehab pun, pasirnya nggak sebanyak itu sih," beber Ima.

Ima menegaskan, data yang dia peroleh dari Dinas Pendidikan adalah data terbaru. Data rencana KUA PPAS yang sudah direvisi. "Sudah paling update. Mereka paparan ke kita sudah update, yang bukan (total rencana APBD, Red) Rp95 tri-

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Publik Hanya Tahu Haislnya

liun. Tapi terbaru (Rp89 triliun-red),” kata Ima.

Ima memastikan akan membawa temuannya ini ke rapat Badan Anggaran (Banggar). Selain soal pasir, ada beberapa anggaran lain yang akan ditanyakan di Banggar.

“Kita kupas di Banggar, kita tolak. Kayak contohnya penghapus cair atau tipe x. Tipe x itu nggak pernah ada ya. Nggak pernah dikasih juga, itu Rp 31 miliar. Terus helm proyek Rp 34 miliar. Kita juga bingung nih helm proyek Rp34 miliar,” kata Ima. (dny/aen)



**Dinas Pendidikan yang banyak terjadi mata anggaran fantastis. Sehingga, perlu diawasi ketat”.**

**Azas Tigor Nainggolan**  
Ketua FAKTA